

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia dalam mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hal yang sangat menarik, dikarenakan tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga publik semakin menguat di daerah. Semakin besar tuntutan terhadap akuntabilitas publik maka akan menimbulkan sebuah implikasi bagi pihak manajemen pemerintahan dalam memberikan sebuah informasi yang lebih baik terhadap publik (Putri et al., 2020).

Menurut (Mardiasmo, 2004) instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya dibidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan

mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Ernawati & Budiyono, 2019).

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat menyajikan dengan memuat informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas atau ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dan dapat dipertanggungjawabkan, karena

hasil dari laporan keuangan akan dimanfaatkan untuk seluruh entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan keputusan penyelenggaraan pemerintahan (Putri et al., 2020).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh para pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Lembaga pemerintah daerah yang wajib membuat laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggara pemerintah berjalan secara maksimal, sehingga laporan keuangan wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap tahun penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memberika opini. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat Opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini

Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Tabel 1.1
Opini LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018-2021

No	LKPD (Tahun)	Opini
1	2018	WDP
2	2019	WTP
3	2020	WTP
4	2021	WTP

Sumber: Sumut bpk.go.id

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan no. 61/LHP/XVIII.MDN/05/2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018 dalam pemeriksaan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal yang dikecualikan ini berupa item tertentu. Opini ini dilatar belakangi karena permasalahan pencatatan aset di daerah pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dimana terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas pengelolaan aset yang kurang lengkap.

Belum lengkapnya pendataan aset di pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan menjadi salah satu penyebab Pemkab Palas belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara umum

permasalahan aset yang ditemukan adalah: nilai aset yang tidak dapat diyakini kewajarannya, pencatatan aset yang tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang sah sehingga pencatatannya tidak akurat, pencatatan aset yang tidak didukung oleh bukti fisiknya, dan terdapat aset yang tidak tercatat dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas. Contoh yaitu adanya aset tetap pengakuan tanah yang tidak di ketahui keberadaannya atau kepemilikannya, aset tetap pengakuan gedung dan bangunan serta pengakuan jalan, irigasi dan jaringan yang tidak didukung dokumen dan tidak diketahui tahun perolehannya. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan gedung.

Sedangkan untuk tiga tahun terakhir 2019-2021 pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut hal ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam mempertahankan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas dengan capaian standard tertinggi dalam akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (padanglawas.go.id).

Kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam daerah itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan

dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh perusahaan dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menghapus semua peluang akan terjadinya kesalahan atau kecurangan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya sebuah kesalahan dan kecurangan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan di atasi (Ernawati & Budiyono, 2019).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi masih terdapat kendala terkait dengan perangkat-perangkat komputer yang dipakai oleh pengguna. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi informasi yaitu komputer dan jaringan internet dalam mengolah data dan menghasilkan informasi yang berkualitas (Ardianto & Eforis, 2019).

Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal karena dengan adanya teknologi informasi maka proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi agar dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan dan meminimalisir kesalahan pencatatan yang terjadi. Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi (Pilander et al., 2018).

Meningkatnya perkembangan dunia dan kemajuan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan andal perlu adanya sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dalam menyusun Laporan Keuangan tentunya membutuhkan *skill* dan kompetensi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dimana banyak kasus yang menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia tersebut tidak hanya diakibatkan oleh kelemahan pengelolaan keuangan daerah sektor administrasi dan birokrasi namun juga bukan hanya akibat keterbatasan dukungan sumber daya manusia saja, akan tetapi juga ada akibat dari kelemahan *law enforcement*. *Law enforcement* yaitu kepatuhan terhadap peraturan, aturan, prosedur serta perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah termasuk laporan keuangan yang dihasilkan. Penyajian transaksi dan laporan keuangan harus jujur agar informasi yang dihasilkan tidak hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh pemakai, namun juga dapat dipercaya dan bermanfaat untuk pemakai itu sendiri (Putri et al., 2020).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, antara lain dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kerja, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada prinsipnya ke-dua Undang-Undang tersebut mengamatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Peningkatan kualitas sumber

daya manusia, baik melalui pendidikan maupun pelatihan kerja dilaksanakan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2013).

Adapun penerapan sistem informasi akuntansi keuangan dalam suatu daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk saat ini, karena sistem informasi akuntansi yang berkualitas berpengaruh terhadap dihasilkannya laporan keuangan berkualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna dalam suatu daerah sebagai dasar pengambilan keputusan dan strategi dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Menurut Muslih (2010) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka diperlukan sistem informasi akuntansi dan komunikasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan operasional suatu organisasi atau perusahaan (Prayanthi & Olivia, 2020).

Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan yang terarah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Gustina, 2021).

Beberapa peneliti terdahulu memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah (Gasperz, 2019) yang variabelnya adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, serta pemanfaatan teknologi informasi. serta

kesimpulan dari riset membuktikan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi secara signifikan pada kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Menurut (Dewi & Hoesada, 2019) yang variabelnya adalah Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, serta Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya Standar Akuntansi Pemerintahan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi pada kualitas pelaporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Menurut (Zulvia et al., 2021) dengan variabel sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia serta teknologi informasi. Berlandaskan hasil yang diperoleh pada sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, serta teknologi informasi secara parsial berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut (Putri et al., 2020) dengan variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, serta pengendalian intern. Hasil penelitiannya membuktikan bahwasannya kompetensi sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Pengawasan keuangan daerah

mempunyai pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah serta pengendalian intern berpengaruh secara simultan pada kualitas laporan keuangan. Maka dari itu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, pengendalian intern bertambah baiknya tentu kualitas laporan keuangan bertambah baik juga.

Menurut (Lusiyana et al., 2020) yang variabelnya adalah kompetensi sumber daya manusia sarta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Berlandaskan hasil yang diperoleh membuktikan bahwasanya Kompetensi sumber daya serta Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi dengan positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Gustina, 2021) yang variabelnya adalah sistem pengendalian intern serta penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yakni Gaperz yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan juga Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku) serta dengan menambahkan variabel independen yaitu Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Berlandaskan hasil penelitian dengan demikian peneliti ingin meneliti lagi dengan replikasi yang dilaksanakan dengan mengelompokkan keempat variabel yakni variabel sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan juga objek yang berbeda yang mana tempat penelitiannya ini dilakukan pada OPD Kabupaten Padang Lawas karena merupakan salah satu sektor pemerintah yang mempunyai basis akrual yang lebih banyak dari pada sektor pemerintah yang lain.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat tema dan akan membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Padang Lawas).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, sehingga masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa OPD Kabupaten Padang Lawas yang belum terlaksana sehingga terjadi penurunan tingkat kualitas laporan keuangan daerah.
2. Penerapan sistem pengendalian intern yang menjadi hal penting agar tercapainya tujuan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

3. Penerapan pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal penting dalam proses laporan keuangan daerah menjadi laporan keuangan yang berkualitas.
4. Penerapan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
5. Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan menjadi hal penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diidentifikasi di atas sebelumnya, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah agar dapat memperoleh bukti empiris apakah sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah didefinisikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas?
4. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas?
5. Apakah sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk menguji sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas.
4. Untuk menguji penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas.
5. Untuk menguji apakah sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem

informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Padang Lawas.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian yang dipaparkan, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Peneliti

Untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai dampak sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, sumber daya manusia, serta penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan daerah.

2. Bagi Praktisi

Penelitian diharapkan bisa membantu pihak pengelola keuangan instansi pemerintah daerah yang lebih relevan dan jelas tentang dampak sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi, pemikiran, penilaian, dan sebagai rujukan saat melaksanakan penelitian yang sejenis agar lebih berkembang dan sempurna bagi penelitian berikutnya.